



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIHARJO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 71350

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/176 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 451 m2/9 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 180.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO NC1 1A3C Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV HHR-V RU1 1,5SCVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOP METIC PRESTICE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 115.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.413.145

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.200.613.145

III. HUTANG Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.200.613.145

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSNI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 1013554

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 55.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, BEAT HONDA Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 361.500.000

III. HUTANG Rp. 607.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -245.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Priyo Budi Admoko
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 198739

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 33.500.000

1. MOTOR, Honda ACH1M1B04 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 160 CBS Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.695.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.923.864

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 523.118.864

III. HUTANG Rp. 506.331.369

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 16.787.495

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MIHARJO

NIK : 6103210101790001

Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Kerja : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Kerja : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA

Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Jenis Laporan : Periodik - 2025

Tanggal Kirim : 21 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : HUSNI
NIK : 1305060507830002
Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Kerja : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Kerja : STASIUN KIPM PALANGKARAYA
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 4 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.